

**ANALISIS WACANA KRITIS
PADA CATATAN NAJWA BERJUDUL “TRIAS KORUPTIKA”
PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH**

Oleh

Siti Ummi Habibah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
Surel: ummihabiebah11@gmail.com

Abstract

Discourse in critical discourse analysis is interpreted as social practices that consist of representation, identity and social relationships, so it is closely related to the context beyond discourse. One of the Catatan Najwa TV Programs entitled “Trias Korupsi” indicates the ideology in the text affected by the social context when the record was created. This study aims to see the construction of ideology and social context behind the writing of the text. This research is qualitative descriptive research. A theory used is a critical analysis of Norman Fairclough’s perspective that includes analysis in three dimensions: analysis of language text, discourse practice, and socio-cultural practice. The results showed that in text analysis, Catatan Najwa voiced disappointment, criticism and built a negative representation of three government institutions due to a corruption case. In the practice of discussion, the ideology can be conveyed and accepted well by society. As for the analysis of socio-cultural practices, the issue of corruption conducted by the supreme court judge and other corruption cases in 2013 had a major role in creating Catatan Najwa: “Trias Korupsi”.

Keywords: *critical discourse analysis, catatan Najwa, corruption, Norman Fairclough*

Abstrak

Wacana dalam kajian analisis wacana kritis dipahami sebagai praktik sosial yang terdiri dari representasi, identitas dan relasi sosial, sehingga berkaitan erat dengan konteks di luar wacana.

Salah satu *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” mengindikasikan adanya ideologi di dalam teks yang dipengaruhi oleh konteks sosial pada saat catatan tersebut dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi ideologi di dalamnya dan konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough yang meliputi analisis pada tiga dimensi yang ada pada “Trias Koruptika” meliputi dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosiokultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis teks, *Catatan Najwa* berjudul “Trias Koruptika” menyuarakan kekecewaan dan kritik serta membangun representasi negatif kepada ketiga lembaga pemerintahan karena kasus korupsi yang terjadi di dalamnya. Pada analisis praktis, ideologi dalam catatan tersebut tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Adapun pada analisis praktik sosiokultural, kasus korupsi yang dilakukan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan kasus-kasus korupsi lainnya yang terjadi pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya berperan besar dalam lahirnya *Catatan Najwa*: “Trias Koruptika”.

Kata kunci: analisis wacana kritis, Catatan Najwa, korupsi, Norman Fairclough

A. PENDAHULUAN

Teks-teks dalam bahasa diwujudkan dalam berbagai bentuk disertai dengan fungsinya masing-masing, seperti teks media berupa media cetak atau media *online* yang digunakan untuk menyampaikan informasi, teks pidato yang digunakan sebagai suatu himbauan atau ajakan, dan teks sastra dalam bentuk novel, drama, prosa, atau puisi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan penulisnya. Teks-teks yang dirangkai secara utuh inilah yang disebut dengan wacana. Secara linguistik, wacana diartikan sebagai satuan bahasa terlengkap dan berada di urutan tertinggi di atas kalimat. Wacana merupakan rangkaian kalimat terlengkap yang mengandung unsur kohesi dan koherensi sehingga membentuk informasi yang utuh. Kohesi adalah kepaduan struktur dan koherensi adalah kepaduan makna (Surastina 2018, 1). Artinya, wacana memiliki fokus yang jelas dan makna yang utuh. Karenanya, puisi sebagai wacana harus dirangkai secara terstruktur agar pesan di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Dengan

demikian, wacana merupakan salah satu objek dalam kajian linguistik, di antaranya objek dalam analisis wacana kritis yang memberikan pandangan berbeda dalam konsep dan pemaknaan wacana.

Wacana dalam pandangan analisis wacana kritis, tidak hanya sebagai objek kajian bahasa. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain pada teks juga pada konteks. Melihat fungsinya sebagai alat komunikasi, ketika bahasa sudah masuk ke dalam bidang tertentu, seperti politik, keagamaan dan juga sastra, bahasa tidak lagi bersifat netral sehingga bahasa tidak terlepas dari kepentingan dan ideologi yang disampaikan oleh penuturnya. Dengan demikian, teks dengan bahasa sebagai mediana bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Dalam hal ini, analisis wacana kritis (selanjutnya, akan disebut AWK) memahami wacana tidak hanya sebagai suatu studi bahasa, tetapi AWK juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks praktik sosial (Fauzan 2014, 3). Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis berupa teks-teks dalam *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika”. Terlihat dari judulnya, catatan yang berbentuk puisi ini menggambarkan ada permasalahan besar yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi. Catatan ini tidak muncul begitu saja, tetapi ada konteks sosial yang melatarbelakanginya, yang kemudian membentuk sebuah ideologi di dalamnya.

Istilah “Trias Koruptika” terinspirasi dari kata *Trias Politica* dalam teori yang dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menjelaskan bahwa penyelenggara negara terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia juga mengenal prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tegas antara tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia berdasarkan prinsip *check and balances*, berbeda dengan pandangan Montesquieu. Lembaga legislatif mencakup DPR, DPD, dan MPR; lembaga eksekutif mencakup presiden, wakil presiden, dan jajaran kabinetnya; serta lembaga yudisial yang mencakup MA dan MK. Mekanisme hubungan antarlembaga-lembaga negara telah diatur dalam UUD 1945 sehingga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling

mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) (Yulisna dan Budianto 2016, 42).

Faktanya, banyak anggota dari ketiga lembaga tersebut terjerat kasus korupsi. Korupsi yang terjadi pada masing-masing dari ketiga lembaga menjadi penyakit kronis di kalangan para politikus sehingga dari sinilah, muncul istilah baru “Trias Koruptika” yang berarti bahwa tindak pidana korupsi telah menjalar ke seluruh lembaga kenegaraan, membohongi amanat rakyat yang telah mereka emban (Habibah dan Rizki, n.d., 66). Situasi tersebut digambarkan secara jelas oleh Najwa Shihab dalam salah satu catatannya yang berjudul “Trias Koruptika”. Oleh karena itu, *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” dibuat tidak hanya untuk dikonsumsi sebagai bahan bacaan di waktu luang, tetapi ada tujuan lain dan faktor yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Di sini, penulis mencoba untuk melihat secara lebih mendalam terkait wacana yang terbentuk dalam teks *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” dengan analisis wacana kritis berdasarkan perspektif Norman Fairclough sebagai teori yang digunakan dalam penelitian.

Analisis wacana kritis merupakan salah satu cara pandang yang melihat bahwa wacana tidak dipahami sekadar objek studi bahasa. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain ada pada teks juga ada pada konteksnya sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu yang mencakup praktik ideologi dan kekuasaan. Norman Fairclough (1989, 23) memandang bahwa bahasa, baik itu secara lisan maupun tertulis merupakan praktik sosial yang juga dapat memberikan pengaruh sosial terhadap yang lain. Praktik sosial ini menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antara struktur sosial dan proses produksi wacana. Memahami wacana tidak cukup hanya dengan melihat teks, tetapi perlu melihat konteks wacananya. Realitas di balik teks atau wacana tersebut dapat ditelusuri dengan mengamati konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang memengaruhi. Oleh karena itu, analisis wacana dalam pandangan Fairclough tidak hanya berfokus pada teks, tetapi mencakup juga pada aspek konsumsi teks oleh pembaca dan relasinya dengan kondisi sosio-kulturalnya (Munfarida 2014, 8).

Fairclough (1989, 110) membagi analisis wacana kritis dalam tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi praktik diskursif, dan dimensi

praktik sosial-kultural. Dimensi teks memfokuskan analisis pada teks secara linguistik meliputi kosa kata, tata bahasa, struktur teks. Teks merupakan bentuk representasi yang mengandung ideologi tertentu sehingga teks dianalisis dengan menggunakan linguistik untuk melihat realita ideologi yang diwujudkan dalam bentuk teks tersebut. Dimensi praktik diskursif mencakup proses produksi (teks sebagai sebuah produk)—yaitu terkait bagaimana suatu teks diproduksi dan proses interpretasi atau konsumsi dan distribusi (teks sebagai sumber informasi)—yaitu terkait bagaimana suatu teks dipahami dan dikonsumsi oleh pembaca atau terkait dengan hubungan teks dengan pembaca. Dimensi sosio-kultural adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks, meliputi kondisi sosial, budaya atau pun politik yang berpengaruh terhadap lahirnya teks.

Selanjutnya, Fairclough (1989, 26) menjelaskan tiga bentuk analisis yang digunakan untuk ketiga dimensi tersebut, yaitu 1) deskripsi digunakan dalam menganalisis teks untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana teks dipresentasikan; 2) interpretasi digunakan dalam menganalisis interpretasi teks mencakup proses produksi, proses konsumsi pada pembaca, dan distribusi; 3) eksplanasi digunakan dalam menganalisis praktik sosio-kultural untuk menggambarkan teks/wacana sebagai praktik sosial serta pengaruh sosial dari teks terhadap pembaca.

Ada beberapa penelitian mengenai analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough dengan objek penelitian yang beragam. Di antaranya, “Meme Politik Setya Novanto sebagai Representasi Demokrasi Digital di Indonesia: Analisis Wacana Kritis” yang ditulis oleh Viena Wanindha Wardani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana *meme* Setya Novanto muncul sebagai salah satu bentuk opini yang dibuat oleh *netizen* melalui *meme* sebagai media dalam menyampaikan kritik dan aspirasinya yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat (Andriani 2019, 258).

Selain itu, ada juga penelitian yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring” yang ditulis oleh Rengganis C. Cenderamata dan Nani Darmayanti. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan hijrahnya Mulan Jameela pada empat

media daring. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran media tidak lepas dari praktik ideologi. Media dengan variatif menyajikan suatu pemberitahuan dengan menggunakan konstruksi tertentu untuk menarik minat pembaca. Empat media daring tersebut menjelaskan berbagai macam realitas dengan karakter pemilihan judul dan wacana yang berbeda-beda sesuai dengan konstruksi ideologinya (Cenderamata dan Darmayanti 2019, 7).

Dengan demikian, kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada teori yang digunakan, yaitu analisis wacana kritis berdasarkan perspektif Norman Fairclough, sedangkan objek kajian yang digunakan pada kedua penelitian tersebut dan penelitian ini berbeda. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah *Catatan Najwa*: “Trias Koruptika”. Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan makna, ideologi yang terbentuk, serta konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya wacana dalam *Catatan Najwa* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati (Muhammad 2011, 30). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data teruai dalam bentuk narasi, kata-kata atau gambar-gambar dan berupa pencatatan seperti dokumen, memorendum, rekaman atau catatan lainnya (Semi 2012, 30).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat. Artinya, peneliti membaca dan menyimak objek penelitian berupa *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika”, kemudian mencatat data-data yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya pada tahap analisis data, data-data tersebut dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis perspektif Norman Fairclough yang mencakup tiga model analisis, yaitu deskripsi dalam analisis teks secara linguistik, interpretasi dalam analisis proses produksi dan interpretasi atau konsumsi wacana serta eksplanasi dalam analisis konteks sosial, budaya, maupun politik yang memengaruhi kehadiran wacana tersebut.

B. ANALISIS WACANA KRITIS PADA CATATAN NAJWA YANG BERJUDUL “TRIAS KORUPTIKA”

Catatan Najwa berjudul “Trias Koruptika” yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan catatan dari Najwa Shihab yang berbentuk puisi. Catatan ini dibuat pada 9 Oktober 2013 dalam program televisi yang dimoderatori oleh Najwa Shihab, yaitu Mata Najwa di salah satu stasiun televisi dengan topik kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar. Catatan-catatan yang dinarasikan pada setiap akhir program sudah dimuat dalam sebuah buku dengan judul *Catatan Najwa*, termasuk di dalamnya adalah catatan yang berjudul “Trias Koruptika”. Teks dalam buku *Catatan Najwa* inilah yang dianalisis oleh peneliti dengan format wacana kritis Norman Fairclough mencakup analisis teks, praktik kewacanaan (diskursif), dan praktik sosiokultural. Berikut ini adalah narasi “Trias Koruptika” dalam buku *Catatan Najwa*.

Rakyat kembali terkesiap,
Ketua MK tertangkap skandal suap.
Benteng terakhir konstitusi tercemari,
langit keadilan dikoyak korupsi.
Tak tanggung-tanggung pelakunya,
hakim sekaligus ketua MK yang mulia.
Tertangkap tangan di rumah dinas,
menerima suap dengan begitu jelas.
Suap Ketua MK melengkapi keborokan,
eksekutif dan legislatif sudah lebih duluan.
Apa sebenarnya yang terjadi,
mengapa abdi negara masih terus nekat korupsi?

Satu demi satu lembaga pengembal amanat reformasi,
takluk oleh rayuan korupsi.
Publik seperti dipaksa putus asa,
melihat pejabat negara bergilir masuk penjara.
MK yang sempat begitu dipercaya,
dalam sekejap dihancurkan Hakim Ketua.
Kita lantas menjadi sangsi,
bagaimana sebenarnya para hakim diseleksi.
Jadi pejabat publik bukan ajang bergaya,
sekadar bagi-bagi jatah trias politika.
Semua lini sudah tercemari korupsi,
semua institusi sudah tercemari.
Dari dalam birokrasi, di kalangan politisi legislasi,
hingga pengadilan konstitusi.
Kita harus mengambil pelajaran inti,
menelaah opsi potong jari atau hukuman mati.
Agar dapat membentengi negeri,

dari pejabat rakus yang tak punya harga diri.
 –Catatan Najwa Trias Korupsi (Shihab 2017, 109–111)–

1. Analisis Teks

Teks tersebut secara garis besar memberikan makna sebagai sebuah sindiran dan kritikan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dipahami dari kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut. Pada baris pertama, penulis menggunakan kata “kembali”. Kata ini menunjukkan adanya suatu kejadian yang berulang. Peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya masih terus-menerus dilakukan hingga masa setelahnya. “Rakyat kembali terkesiap” mengindikasikan bahwa kasus korupsi ini sudah banyak terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan terjadi lagi di masa sekarang sehingga rakyat lagi-lagi dikejutkan dengan kasus-kasus seperti itu. Kata “benteng” pada “Benteng terakhir konstitusi tercemari, langit keadilan dikoyak korupsi” merujuk pada Mahkamah Konstitusi.

Benteng umumnya diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Dengan kata lain, MK sebagai benteng, dan para koruptor sebagai musuh. Penggambaran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng merupakan hal yang tepat apabila dilihat dari fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk memutus berbagai persengketaan antarlembaga negara dan sengketa pemilu termasuk permasalahan korupsi. Persoalan-persoalan ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bagi rakyat adalah tempat berlindung dari ketidakadilan dan penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi fakta menunjukkan sebaliknya, kata “dikoyak” memberikan arti bahwa korupsi sudah masuk ke dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dengan bukti adanya suap yang dilakukan Hakim Ketua. Pemilihan kata tersebut menunjukkan adanya representasi negatif terhadap keseluruhan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) secara tidak langsung.

Adapun kata “keborokan” yang dimaksud dalam “Suap Ketua MK melengkapi keborokan, eksekutif dan legislatif sudah lebih duluan” adalah korupsi. Kata tersebut merujuk pada sesuatu yang kotor. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan perilaku kotor yang seharusnya tidak dilakukan. Namun faktanya, banyak para pejabat negara yang

dalam *Catatan Najwa* disebut dengan “abdi negara” tertangkap basah melakukan korupsi. Penggunaan kata “abdi negara” dan “korupsi” menunjukkan adanya kontradiksi. Sebagai abdi negara atau pelayan negara, mereka seharusnya bertugas untuk memberikan pelayanan kepada publik secara profesional agar sistem pemerintahan demokratis dan baik dapat terlaksana. Sementara korupsi adalah perbuatan yang merugikan rakyat dan negara. Oleh karena itu, kasus-kasus korupsi oleh para anggota lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan instansi negara lainnya merupakan sebuah ironi, bertentangan dengan dengan tugas yang diemban dan menciderai harapan rakyat.

Selanjutnya, pada baris “Kita lantas menjadi sangsi, bagaimana sebenarnya para hakim diseleksi” kata “sangsai” berarti ragu. Apabila seseorang merasa ragu, maka menandakan ada hal yang tidak benar atau keliru. Ragu atau sangsi juga bisa muncul sebagai respons dari sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, korupsi yang terjadi secara terus-menerus dan ditambah dengan adanya korupsi oleh Hakim Ketua MK memunculkan keraguan terkait kelayakan hakim yang dipilih. Pada kalimat “bagi-bagi jatah trias politika” juga menunjukkan sebuah posisi atau jabatan diibaratkan sesuatu yang bisa dengan mudah untuk dibagi kepada siapa saja, padahal sebuah jabatan dalam suatu instansi termasuk instansi negara seharusnya diduduki oleh orang yang memang kompeten dengan melalui berbagai seleksi secara jujur, bukan menjadi jatah yang dibagi kepada kerabat atau kelompoknya untuk kepentingan tertentu. Bagi-bagi jabatan ini justru memberikan ruang yang lebih luas untuk terjadinya korupsi. Selain itu, penggunaan kata ganti “kita” juga menunjukkan adanya relasi antara Najwa Shihab sebagai penulis dan masyarakat sebagai pembaca atau pendengar. Hal ini menandakan bahwa masyarakat turut diikutsertakan dalam mengonstruksi wacana dan ideologi dalam *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” yang ditunjukkan kepada para elit politik.

Penyebutan dua sifat pada baris “dari pejabat yang rakus dan tak punya harga diri” yang disematkan kepada para koruptor menunjukkan adanya makna penekanan. Keduanya, “rakus” dan “tidak punya harga diri”, berorientasi pada hal yang sama, yaitu mengarah kepada hal yang negatif. Pengulangan kata dengan makna yang sama memberikan fungsi

sebagai penguat atau penegasan terhadap makna. Dari sini, dapat dipahami bahwa korupsi merupakan perbuatan yang salah. Orang yang melakukan korupsi menandakan bahwa ia adalah pribadi yang serakah dan tidak lagi memiliki kehormatan dalam dirinya. Hal ini memberikan representasi negatif juga terhadap koruptor.

Secara gramatikal, kalimat-kalimat dalam *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Fairclough (1989, 125) membagi tiga bentuk kalimat dalam gramatikal yang berfungsi untuk menunjukkan nilai relasional, yaitu terkait hubungan sosial yang tergambar pada teks dalam sebuah wacana. Ketiga bentuk kalimat tersebut adalah kalimat deklaratif, pertanyaan gramatikal, dan kalimat interatif.

Pada teks “Trias Koruptika” tersebut, bentuk kalimat yang paling banyak digunakan adalah kalimat deklaratif, yaitu bentuk kalimat dengan pola subjek dan setelahnya diikuti predikat. Kalimat deklaratif berfungsi menyampaikan informasi dari penulis atau pembicara sebagai informan kepada pendengar atau pembaca sebagai penerima informasi. Artinya, melalui *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika”, penulis menggambarkan realita sosial yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang sudah menjalar sampai kepada tiga lembaga pemerintahan serta instansi-instansi negara lainnya dan menyampaikannya kepada publik.

2. Praktik Diskursif dan Kepentingan Ideologi

Teks dalam suatu wacana tidak muncul sendiri, tetapi ada hal-hal yang melatarbelakangi munculnya teks tersebut atau konteks di balik wacana. Artinya, ada proses produksi di balik lahirnya wacana tersebut yang kemudian dibagikan dan didistribusikan kepada pembaca. Dengan kata lain, selain ada proses produksi, juga terdapat proses konsumsi. Dengan demikian, ada fakta ideologi yang disampaikan oleh penutur atau penulis melalui wacana yang dibuat. Ideologi diartikan sebagai suatu pandangan atau gagasan dari kelompok sosial tertentu.

Catatan Najwa yang berjudul “Trias Koruptika” ini hadir sebagai bentuk kritik dan sindiran terhadap pemerintah karena banyaknya para pejabat yang terjerat kasus korupsi dari mulai kasus korupsi e-KTP sejak

tahun 2011 hingga 2018 yang menjerat Ketua DPR, Setya Novanto, hingga kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada tahun 2013 yang juga menyeret beberapa kepala daerah pada saat itu. Hal ini menunjukkan adanya ideologi-ideologi yang ingin disampaikan penulis terkait dengan fenomena korupsi di Indonesia melalui tulisannya berupa *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika”.

Pada baris “Benteng terakhir konstitusi tercemari, langit keadilan dikoyak korupsi”, penulis menyampaikan adanya rasa kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusi negara yang menjadi harapan terakhir bagi rakyat untuk menggantungkan kepercayaan dan menyampaikan ketidakadilan yang dilakukan para pejabat terhadap rakyat. Tetapi, dengan tertangkapnya Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi karena kasus korupsi, membuat kepercayaan rakyat runtuh. Rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah karena kepercayaan yang sudah dikhianati dari mulai kasus-kasus korupsi para anggota DPR, kepala daerah, hingga hakim Ketua MK seperti yang disampaikan melalui baris “Semua lini sudah tercemari korupsi, semua institusi sudah tercemari, Dari dalam birokrasi, di kalangan politisi legislasi, hingga pengadilan konstitusi”. Baris tersebut menggambarkan bahwa sudah tidak ada lagi lembaga pemerintahan yang berlaku jujur dan adil. Karenanya, hal tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan rakyat “kepada siapa lagi rakyat harus percaya?” Hal ini juga sejalan dengan baris “Publik seperti dipaksa putus asa, melihat pejabat negara bergilir masuk penjara, MK yang sempat begitu dipercaya, dalam sekejap dihancurkan Hakim Ketua”.

Salah satu barisnya “mengapa abdi negara masih terus nekat korupsi” dapat dipahami bahwa ada ideologi yang ingin disampaikan oleh penulis terkait tuntutan bagi para pejabat untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab terhadap tugas dan amanat yang sudah diemban. Pemerintah sebagai abdi negara seharusnya menyadari bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga maupun kelompoknya sementara rakyat terus tertindas. Para anggota legislatif dipilih oleh rakyat, maka seharusnya bekerja pun untuk rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”.

Selanjutnya, baris “Satu demi satu lembaga pengemban amanat reformasi, takluk oleh rayuan korupsi” merupakan bentuk kritik terhadap lembaga pemerintahan yang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Ideologi yang ingin disampaikan melalui teks tersebut adalah gagalnya lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lembaga pemerintahan sudah mengingkari nilai-nilai reformasi yang sudah diperjuangkan sejak 23 tahun yang lalu. Salah satu di antaranya tidak melibatkan dominasi partai politik, elit partai, dan orang-orang berkepentingan dalam mengambil suatu kebijakan, keputusan, dan aturan. Dengan kata lain, rakyat sebenarnya memiliki andil dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Suara, keluhan dan aspirasi rakyat seharusnya dapat tersampaikan dengan diwakili oleh DPR sebagai perwakilan rakyat, tetapi faktanya, justru menunjukkan sebaliknya. Para anggota DPR menggunakan kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenuhi kepentingan kelompok mereka sehingga banyak terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Para koruptor seharusnya dihukum secara adil sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal lain. Najwa Shihab mengatakan, “Kita harus mengambil pelajaran inti, menelaah opsi potong jari atau hukuman mati.” Pada teks tersebut, penulis menyampaikan bahwa hukuman bagi koruptor yang berlaku di Indonesia tidak memberikan efek jera karena masa penjara yang tergolong singkat dan adanya fasilitas yang nyaman. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, penjara bagi para pejabat berbeda dengan penjara para pelaku tindak kejahatan lain yang notabenenya adalah masyarakat biasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kuasa atau memiliki uang akan diberi kelonggaran termasuk dalam ranah hukum. tidak heran kasus korupsi di Indonesia terus bertambah hingga sekarang. Oleh karena itu, penulis mengatakan hukum potong tangan seperti dalam hukum Islam atau hukuman mati bisa menjadi pilihan hukuman untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.

Di samping itu, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, juga memunculkan keraguan rakyat terhadap kredibilitas para penyeleksi dan kejujuran dalam sistem penyeleksian hakim, apakah dilandasi unsur kepentingan suatu kelompok atau tidak. Ideologi inilah

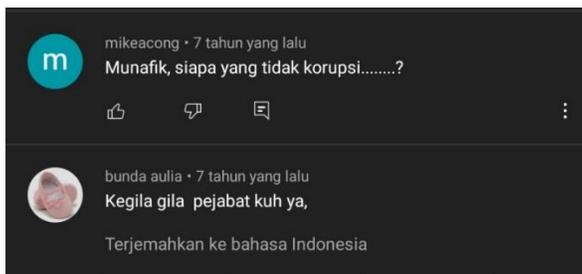
yang disampaikan penulis melalui salah satu baris pada catatannya yang berbunyi “Kita lantas menjadi sangsi, bagaimana sebenarnya para hakim diseleksi”.

Apabila dilihat secara keseluruhan, ideologi penulis tersampaikan secara jelas melalui kalimat-kalimat dalam *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika”. Ideologi tersebut meliputi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kegagalan lembaga pemerintahan, tuntutan akan keadilan yang harus ditegakan, kejujuran, dan sikap tanggung jawab yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas dan amanat sebagai abdi negara, serta hukum yang tegas dan dapat memberikan efek jera bagi para koruptor untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Najwa Shihab dikenal sebagai seorang wartawan dan tokoh publik yang konsisten membahas permasalahan dan isu-isu hangat yang sedang terjadi di Indonesia melalui program yang dipandunya, yaitu *Mata Najwa*. Najwa Shihab mampu menyampaikan aspirasi, harapan, kritik, dan kegelisahan yang dirasakan masyarakat serta mengungkap fakta-fakta yang ada terkait isu yang dibahas. Oleh karena itu, *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” mewakili rasa kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap pemerintah karena kasus-kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Meskipun *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” dibuat pada tahun 2013, ideologi-ideologi di dalamnya masih tetap sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan melalui respons masyarakat yang terlihat dalam komentar-komentar pada tayangan *Mata Najwa* episode “Trias Koruptika” dan video Najwa Shihab lainnya mengenai korupsi di kanal *Youtube*-nya, seperti pada video “Catatan Najwa #KitaKPK”.

Gambar 1
Komentar pada Video Mata Najwa Episode “Trias Koruptika”
9 Oktober 2013





Gambar 2
Komentar pada Video Catatan Najwa “#KitaKPK”
16 September 2019



3. Praktik Sosiokultural

Dimensi ketiga terkait dengan analisis konteks sosial, budaya atau pun politik di luar wacana yang turut memengaruhi. Latar belakang utama munculnya *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” ini adalah kasus korupsi yang sudah merambat ke semua lembaga pemerintahan. Korupsi merupakan permasalahan besar yang hampir dihadapi berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, korupsi seolah-olah sudah menjadi sebuah tradisi yang mengakar dan terus dilakukan oleh para pejabat pemerintahan meskipun sudah banyak koruptor yang tertangkap. Semua lembaga pemerintahan sudah tercemari korupsi para anggotanya, baik itu DPR, MPR, kementerian negara, kepala daerah hingga Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari laman berita *Kompas*, kasus suap ketua Mahkamah Konstitusi merupakan kasus korupsi pertama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan terlebih lagi pelakunya adalah hakim ketua yang tertangkap tangan melakukan pencucian uang dan suap terkait pengurusan sengketa pilkada di sejumlah daerah hingga ratusan miliar. Salah satu bukti yang ditemukan adalah uang sebesar 1 miliar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten dan uang sebesar 3 miliar terkait Pilkada Kota Palembang. Berdasarkan kasus ini, Akil Mochtar divonis hukuman penjara seumur hidup (Movanita 2014). Sebagaimana berita yang dimuat dalam *Merdeka.com* tahun 2014, ada sekitar 59 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi selama 10 tahun terakhir berdasarkan Survei Transparansi Internasional (Ailliansyah 2014).

Adapun terkait program *Mata Najwa* yang dimoderatori oleh Najwa Shihab merupakan program yang tidak terikat dengan institusi mana pun. Artinya bahwa program ini bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh institusi dan tidak berpihak kepada satu golongan. Program *Mata Najwa* ini justru lantang membahas isu-isu terkait politik, ekonomi, budaya, dan bidang lainnya yang sedang terjadi di Indonesia. Melalui *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Koruptika” inilah masyarakat merasa terwakili dalam menyampaikan kritik dan kekecewaannya mengenai korupsi yang terus-menerus dilakukan oleh para abdi negara.

C. SIMPULAN

Dari pemaparan analisis, dapat disimpulkan bahwa di balik wacana terdapat makna dan perspektif yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Wacana juga dipandang sebagai praktik ideologi atau refleksi dari ideologi tertentu, termasuk dalam salah satu *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Korupsi”. Catatan tersebut merupakan kritikan dan sindiran yang ditujukan kepada pemerintah, khususnya ketiga lembaga negara. Suara dan keluhan masyarakat mengenai permasalahan korupsi di Indonesia dapat tersampaikan melalui *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Korupsi”. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat ideologi yang dibangun di dalam teks dan realita sosial di luar teks tersebut melalui analisis pada tiga aspek dimensi sosial dalam teks mencakup teks itu sendiri, praktik diskursif (kewacanaan) meliputi produksi dan konsumsi teks, serta praktik sosiokultural meliputi konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya teks.

Pada aspek analisis teks, rasa kekecewaan dan kegelisahan rakyat terkait korupsi di Indonesia dapat tersampaikan secara jelas dengan penggunaan kata dan rangkaian kalimat yang sesuai. Selain itu, banyaknya penggunaan kalimat deklaratif dalam catatan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara penulis atau pembicara sebagai informan dan pendengar atau pembaca sebagai penerima informasi. Pada analisis praktik diskursif, ideologi yang dibangun dalam catatan tersebut diterima oleh masyarakat yang tercermin dari respons masyarakat terhadap kasus korupsi yang sedang terjadi. Adapun pada analisis praktik sosiokultural, kasus korupsi yang dilakukan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dan kasus-kasus korupsi lainnya yang juga terjadi pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya berperan besar dalam munculnya *Catatan Najwa* yang berjudul “Trias Korupsi”.

DAFTAR PUSTAKA

Ailliansyah, Muhamad Agil. 2014. *Ini Daftar Anggota DPR Terseret Korupsi 10 Tahun Terakhir*. <https://m.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html>.

- Andriani, Viena Wanidha. 2019. "Meme Politik Setya Novanto sebagai Representasi Demokrasi Digital di Indonesia: Analisis Wacana Kritis." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 3 (2): 231–60.
- Cenderamata, Rengganis Citra, dan Nani Darmayanti. 2019. "Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring." *Literasi: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya* 3 (1): 1–8.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Inc.
- Fauzan, Umar. 2014. "Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills." *Jurnal Pendidik* 6 (1).
- Habibah, Siti Umami, dan Geubrina Rizki. n.d. "Trias Corruptika and Public Expectations in Catatan Najwa (Sociological Criticism: Alan Swingewood)." In *Language, Literature and Media in Digital Era*. Malang: UIN Maliki Press.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2014. *Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>.
- Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munfarida, Elya. 2014. "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8 (1): 1–19.
- Semi, M. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: CV Angkasa.
- Shihab, Najwa. 2017. *Catatan Najwa*. Tangerang Selatan: Literati.
- Surastina. 2018. *Pengkajian Wacana: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Elmatara publishing.
- Yulisna dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press.